

PENGOPERASIAN APLIKASI SISTEM
KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM
PENYUSUNAN LAPORANREALISASI
ANGGARAN DENGAN BERPEDOMAN
PADA PSAP 02 (PERNYATAAN STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAH) DI DESA
UMBU'ASI BARAT

By Mefina Waruwu

**PENGOPERASIAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES)
DALAM PENYUSUNAN LAPORANREALISASI ANGGARAN DENGAN
BERPEDOMAN PADA PSAP 02 (PERNYATAAN STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAH) DI DESA
UMBU'ASI BARAT**

TUGAS AKHIR



Oleh :

**Mefina Waruwu
2121009**

73

PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NIAS

2024

**PENGOPERASIAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES)
DALAM PENYUSUNAN LAPORANREALISASI ANGGARAN DENGAN
BERPEDOMAN PADA PSAP 02 (PERNYATAAN STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAH) DI DESA
UMBU'ASI BARAT**

20

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada :

Universitas Nias

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Ahli Madya Pada Program Studi D-III Akuntansi**

Oleh :

**Mefina Waruwu
2121009**

PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NIAS

2024

ABSTRAK

PENGOPERASIAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN DENGAN BERPEDOMAN PADA PSAP 02 DI DESA UMBU'ASI BARAT

Oleh

Mefina Waruwu

Pelaporan keuangan desa yang dilakukan secara manual memungkinkan adanya kesalahan termasuk ketidaksesuaian total rincian dana. Selain itu, penggunaan cara manual memerlukan banyak lembaran kertas serta menghabiskan anggaran desa yang cukup besar di Desa Umbu'asi Barat. Untuk itu, Pemerintah Pusat serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menyediakan regulasi agar semua desa menggunakan aplikasi sistem keuangan desa dalam penyusunan laporan keuangan. Untuk mendorong Desa Umbu'asi Barat dapat menerapkan sistem keuangan desa secara aplikasi supaya memudahkan dan efisiensi kerja aparatur desa dalam melaporkan hasil keuangan di desa. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk dengan menganalisis masalah dengan sumber data primer dan sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara serta dokumentasi. Hasil penelitian memperlihatkan pengoperasian aplikasi sistem keuangan desa dari berbagai aspek, yaitu mutu, tepat waktu, tujuan, standar, umpan balik, alat/sarana, kompetensi, motif, dan peluang, sudah cukup baik, Hal ini dapat meningkatkan kinerja aparatur desa. Selain itu, pengoperasian aplikasi sistem keuangan desa juga membuat pengelolaan keuangan desa menjadi terbuka dan dipertanggungjawabkan.

Kata Kunci : Pengoperasian Aplikasi Siskeudes, Laporan Realisasi Anggaran, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah.

ABSTRACT

70 OPERATION OF THE VILLAGE FINANCIAL SISTEM APPLICATION (SISKEUDES) IN PREPARING BUDGET REALIZATION REPORTS GUIDED BY PSAP 02 IN WETS UMBU'ASI BARAT VILLAGE

By

MEFINA WARUWU

Manual reporting of village finances allows for errors, including discrepancies in total fund details. In addition, the use of manual methods requires many sheets of paper and consumes a large village budget in West Umbu'asi Village. For this reason, the Central Government and the Financial and Development Supervisory Agency provide regulations so that all villages use the village financial system application in preparing financial reports. To encourage West Umbu'asi Village to implement a village financial system application in order to facilitate and streamline the work of village officials in reporting financial results in the village. In this study using descriptive qualitative methods to analyze problems with primary and secondary data sources obtained through observation, interviews and documentation. The results showed that the operation of the village financial system application from various aspects, namely quality, timely, goals, standards, feedback, tools means, competence, motives, and opportunities, was quite good, this could improve the performance of village officials. In addition, the operation of the village financial system application also makes village financial management open and accountable.

Keywords : Operation Of The Siskeudes Application, Budget Realization Report, Statement Of Government Accounting Standards.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pengasih atas anugerah-nya yang berkelimpahan memberikan pengetahuan, kekuatan, kemampuan sepanjang kehidupan penulis, Tugas Akhir yang Berjudul “Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Dengan Berpedoman Pada PSAP 02 (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah) Di Desa Umbu’asi Barat” ini dapat diselesaikan semata-mata karena belas kasihan Allah yang maha penyayang kepada penulis. Sehingga penulis bisa mengerjakan penulisan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa penyusun Tugas akhir ini, bukanlah semata mata karena kemampuan penulis, ini semua merupakan buah kerjasama, motivasi, dukungan, bimbingan, arahan dan doa dari semua pihak. Oleh sebab itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang secara langsung turut membantu penulis.

1. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Eliyunus Waruwu, S.Pt.,M.Si, Selaku Rektor Universitas Nias.
2. Ucapan terima kasih kepada Bapak Kurniawan S. Zai, SE.,M.Ak.,Ak, Selaku Dosen Pembimbing
3. Ucapan terima kasih kepada Ibu Serniati Zebua, S.Pt.,M.Si, Selaku Ketua Program Studi D III Akuntansi

4. Seluruh bapak/ibu Dosen di Universitas Nias atas semua ilmu yang telah diberikan kepada penulis

Semoga Tuhan yang maha penyayang dan pengasih melimpahkan anugerahNya dengan berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut mendukung penyelesaian tugas akhir ini, kiranya tuhan memberkati kita.

Gunungsitoli, Agustus 2024

Penulis,

MEFINA WARUWU
NPM : 2121009

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|-------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| DAFTAR GAMBAR..... | vii |
| DAFTAR TABEL | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 3 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 3 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 4 |
| 1.5 Metode Penelitian | 4 |
| 1.5.1 Jenis Penelitian | 4 |
| 1.5.2 Lokasi dan Waktu Penelitian | 5 |
| 1.5.3 Jenis dan Sumber Data | 5 |
| 1.5.4 Metode Pengumpulan Data | 6 |
| 1.5.5 Teknik Analisis Data..... | 6 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 8 |
| 2.1 Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) | 8 |
| 2.1.1 Pengertian Aplikasi (Siskeudes) | 8 |
| 2.1.2 Tujuan Aplikasi Sistem Keuangan Desa..... | 9 |
| 2.1.3 Hambatan atau Kendala Dalam Pengoperasian Apk Siskeudes | 10 |
| 2.1.4 Pengelolaan Keuangan Desa | 11 |
| 2.1.5 Laporan Realisasi Anggaran | 11 |
| 2.1.6 Format Laporan Realisasi Anggaran..... | 12 |
| 2.2 Penelitian Terdahulu | 21 |

| | |
|---|-----------|
| 2.3 Kerangka Berpikir | 23 |
| BAB III PEMBAHASAN | 24 |
| 3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 24 |
| 3.1.1 Sejarah Singkat Desa Umbu'asi Barat | 24 |
| 3.1.2 Visi dan Misi | 25 |
| 3.1.3 Program Kerja | 25 |
| 3.1.3 Struktur Organisasi | 27 |
| 3.2 Pembahasan | 28 |
| 3.2.1 Tata Cara Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa | 28 |
| 3.2.3 Administrasi Data User | 32 |
| 3.2.4 Laporan Realisasi Anggaran Pemerintahan Desa Umbu'asi Barat.. | 34 |
| 3.2.5 Kesimpulan Laporan Realisasi Anggaran | 40 |
| BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN | 41 |
| 4.1 Kesimpulan | 41 |
| 4.2 Saran | 42 |
| DAFTAR PUSTAKA | 44 |
| DAFTAR LAMPIRAN | 45 |

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, desa mencakup desa, desa adat, atau sebutan lain yang serupa. Desa adalah entitas masyarakat hukum dengan batas wilayah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat lokal, berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal-usul, atau hak tradisional yang diakui dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tugas utama pemerintah desa meliputi pengaturan dan pengelolaan urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Untuk mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan desa, diperlukan pendapatan yang memadai.

Dengan adanya dana bantuan untuk desa, pemerintah desa diharapkan siap dan mampu mengelola keuangan desa sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Pengelolaan harus dilakukan secara tertib dan disiplin sesuai dengan anggaran serta mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan ini mengatur bahwa pengelolaan keuangan desa mencakup perencanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan, yang dilakukan oleh Kepala Desa dengan dukungan dari Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

Pemerintah harus menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi berkualitas. Laporan keuangan yang baik harus memenuhi kriteria relevansi, keandalan, perbandingan, dan pemahaman sesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintah (SAP). Untuk mencegah potensi kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa, diperlukan langkah-langkah antisipasi, pengendalian, dan pencegahan melalui struktur dan sistem yang efektif. Hal ini memastikan bahwa penggunaan dana desa dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa. Dalam hal ini, semua instansi terkait termasuk Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Kabupaten—harus bersinergi dalam pengendalian dan pengawasan dana desa.

Kemajuan teknologi informasi di masa modern ini, pemerintah daerah memperbaharui cara mengelola sistem keuangan daerah agar mengoptimalkan mutu informasi akuntansi. Menurut Rostami dan Mongadam (2010), teknologi informasi bisa berfungsi sebagai penyokong keefektifan untuk organisasi dalam menerapkan strategi yang diterapkan.

⁸⁰
¹² Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkapkan bahwa pengembangan Aplikasi Sistem Keuangan Desa telah direncanakan sejak awal untuk menyambut penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kesiapan ini selaras dengan atensi yang meningkat dari Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Aplikasi ini secara resmi diluncurkan pada 13 Juli 2015.

⁸ Mulai tahun 2015 secara bertahap Aplikasi Sistem Keuangan Desa mulai diperkenalkan kesetiap desa-desa termasuk desa di wilayah Pemerintah Kabupaten. Berdasarkan hasil pengamatan, implementasi sistem keuangan desa tidak semua dapat mengimplementasikannya dengan baik. Hal tersebut terjadi karena (1) Terbatasnya pendukung sumber daya manusia pada publikasi keuangan (2) Kurang kemampuan performa perangkat desa untuk mengoperasikan aplikasi siskeudes disebabkan kurangnya pengalaman dan keahlian dibagian peralatan dan informasi komputer (3) Tidak semua operator sistem keuangan desa memiliki latar belakang akuntansi. Upaya pemantapan

aplikasi Sistem Keuangan Desa tersebut terus dilakukan secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Berdasarkan observasi di Desa Umbu'asi Barat, aplikasi Siskeudes dapat meminimalisir kecurangan dan menawarkan kemudahan operasional, serta menghasilkan laporan yang lebih lengkap. Dampaknya bagi aparat desa dan Bendahara desa sangat positif; proses input data menjadi lebih mudah, dan laporan akhir yang dihasilkan sangat membantu serta lebih akurat dalam pelaksanaan tugas.

Dengan keberadaan sistem ⁷⁷ pengelolaan keuangan desa yang baik, pemerintah desa ⁷² diharapkan dapat menjalankan pemerintahan yang lebih mandiri dan mencapai tujuan ² sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, serta memaksimalkan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Mengingat pentingnya penggunaan aplikasi sistem keuangan desa untuk menciptakan pengelolaan yang akuntabel, maka penelitian tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dengan Berpedoman pada PSAP 02 (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan) di Desa Umbu'asi Barat”**.

²⁹

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan yang ditemui ²² dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah **“Bagaimana Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dengan Berpedoman pada PSAP 02 (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan) di Desa Umbu'asi Barat”**?

⁸

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Penyusunan Laporan

Realisasi Anggaran dengan Berpedoman pada PSAP 02 (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan) di Desa Umbu'asi Barat.

6

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pembaca

Penelitian ini diinginkan bisa memperkaya rujukan serta menjadi sumber acuan untuk peneliti yang akan datang, terutama dalam meneliti variabel-variabel terkait. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk membuka gagasan mengenai penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa untuk merealisasikan pertanggungjawaban terhadap keuangan desa.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa dalam mencapai akuntabilitas keuangan desa, serta menambah pengalaman dan memenuhi salah satu syarat kelulusan D-III Akuntansi.

3. Bagi Praktis

Penelitian ini bertujuan bisa memperluas informasi yang berguna untuk Desa Umbu'asi Barat, seperti saran dan evaluasi terkait hasil penelitian mengenai pengaplikasian aplikasi sistem keuangan desa untuk merealisasikan pertanggungjawaban terhadap keuangan desa.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Creswell dalam Herdinsyah (2014:8) mendefinisikan penelitian deskriptif kualitatif Proses penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang berbagai masalah manusia dalam konteks sosial, dengan menyajikan gambaran menyeluruh dan melaporkan perspektif rinci dari berbagai sumber informasi.

26 Sugiyono (2019:18) mendefinisikan metode kualitatif sebagai pendekatan penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang diterapkan dalam situasi objek yang bersifat alami (sebagai lawan dari eksperimen). 75 Dalam penelitian ini, pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari lapangan. Peneliti melakukan pengamatan untuk menilai efektivitas pengoperasian aplikasi Siskeudes di Desa Uumbu'asi Barat.

8 1.5.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini berada di Desa Uumbu'asi Barat, Kecamatan Hilisalawa'ahe, Kabupaten Nias Selatan. jadwal pelaksanaan penelitian mulai dari tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan 25 Juli 2024.

1.5.3 Jenis dan Sumber Data 32

Berdasarkan dari jenisnya, maka kita dapat membedakan data kualitatif sebagai data primer dan data sekunder. 30

a. Data Primer

Menurut Sugiyono (2018:456), Data primer adalah data yang secara langsung memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Data ini dikumpulkan secara mandiri dan langsung dari subjek utama (key informan) atau lokasi penelitian, serta memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian, yaitu di Desa Uumbu'asi Barat.

14 b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2018:456), data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber utama, melainkan melalui pihak ketiga atau dokumen. 31 Dalam penelitian ini, sumber data sekunder meliputi Undang-Undang Ketenagakerjaan, buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan topik mengenai sistem dan prosedur penggajian untuk mendukung efisiensi biaya tenaga kerja.

1.5.4 Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2020:109), observasi yaitu proses mengamati secara langsung yang dilakukan peneliti agar memahami situasi keterangan dari seluruh keadaan sosial. Hal ini bertujuan untuk memperoleh pandangan yang holistik dan menyeluruh.

b. Wawancara

Wawancara diartikan sebagai metode yang dipergunakan dalam menyatukan data penelitian. Menurut Yusuf (2014:372), wawancara adalah proses interaksi antara pewawancara dan narasumber, di mana narasumber memberikan informasi melalui sesi tanya jawab langsung mengenai objek yang sedang diteliti. Metode wawancara ini bertujuan untuk memahami pendapat informan dan memperoleh pemahaman mendalam mengenai topik penelitian yang sedang dilakukan.

c. Dokumentasi

Sugiyono (2018:476) memaparkan bahwa dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data atau keterangan seperti kearsipan, buku, catatan serta sumber lainnya yang dapat berupa nilai dan gambar dalam sebuah laporan. Dokumentasi ini berfungsi sebagai penunjang penelitian dengan menyediakan bahan-bahan yang relevan dan mendukung.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2019), analisis data yang dilakukan pada penelitian kualitatif dilakukan sebelum dan sesudah pengumpulan data. Selama sesi Tanya jawab, peneliti menganalisis penjelasan narasumber, dan bila hasilnya belum memenuhi harapan, peneliti akan mengajukan pertanyaan tambahan hingga memperoleh data yang dianggap dipercaya. Kegiatan

5
dalam analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data bisa membutuhkan waktu yang sangat lama, peneliti menjelajahi situasi sosial atau objek penelitian secara umum, sehingga data yang diperoleh menjadi sangat beragam dan bervariasi.

2. Reduksi Data

Data yang diterima dari lokasi penelitian yang berjumlah sangat banyak, memerlukan pencatatan secara cermat serta detail. Dalam mengatasi hal ini, penganalisaan data harus segera dilakukan secara reduksi data. Reduksi data adalah meringkas, memilah, dan memiliki elemen-elemen penting, dan menemukan pokok bahasan dan skema. Melalui reduksi data, peneliti bisa mendapatkan pemahaman yang lebih dimengerti, memudahkan mengumpulkan data berikutnya, dan memudahkan pencarian data saat diperlukan.

3. Penyajian Data

Penyampaian data dapat dilakukan melalui penjelasan ringkas, bagan, interaksi, flowchart, dan metode lainnya. Metode yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif adalah menyederhanakan pemahaman tentang rencana kerja yang bertujuan untuk dapat dipahami.

4. Penarik Kesimpulan

Kesimpulan awal bersifat tentatif sering akan terjadi perubahan bila tak ada dukungan dokumen pendukung dalam langkah penyusunan keterangan selanjutnya. Bila, ada kesimpulan awal didukung dokumen pendukung yang akurat serta seragam saat data dikumpulkan selanjutnya, maka kesimpulan tersebut dianggap dapat dipercaya.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

2.1.1 Pengertian Aplikasi (Siskeudes)

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, aplikasi ialah merancang cara dalam mengelola informasi (keterangan) dengan pengaturan serta perintah program, yang dikembangkan supaya mempermudah pengerjaan kerja tertentu untuk seseorang. Aplikasi berfungsi sebagai alat bagi pengelolaan data. Menurut Sanjaya (2015), Aplikasi merupakan perangkat lunak yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan teknologi untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Contohnya adalah Microsoft Word, Microsoft Excel, dan aplikasi-aplikasi sejenis lainnya yang dikembangkan untuk memudahkan pengguna dalam melakukan pekerjaan atau aktivitas-aktivitas spesifik.

¹¹ Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memudahkan pelaporan keuangan desa dan memastikan pengelolaan keuangan desa dilakukan secara optimal. Aplikasi ini berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Siskeudes diyakini dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan. Dengan menggunakan aplikasi ini, proses pelaporan keuangan desa menjadi lebih terstruktur dan akuntabel, sehingga mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di tingkat desa.

Jadi, Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan untuk memfasilitasi dan meningkatkan pengelolaan keuangan desa agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di tingkat pemerintahan desa..

Menurut Jogiyanto (2013), Aplikasi Siskeudes adalah alat untuk menerapkan dan menyimpan data, permasalahan, atau pekerjaan ke dalam suatu media. Aplikasi ini mengubah hal-hal tersebut menjadi bentuk baru tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar dari data, permasalahan, dan pekerjaan tersebut.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa sangat membantu dalam pengelolaan keuangan desa dengan kemudahan operasionalnya. Pengguna hanya perlu memasukkan data atau transaksi, dan laporan yang diinginkan, seperti buku kas umum atau buku kas pembantu pajak, akan langsung tersedia. Tujuan utama sistem ini adalah untuk mengatasi kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

2.1.2 Tujuan Aplikasi Sistem Keuangan Desa

Menurut surat edaran Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri No.412.2/594/BPDI pada tanggal 28 Agustus 2019, tujuan dari Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) adalah sebagai alat bantu berbasis sistem informasi yang resmi dari pemerintah. Siskeudes dirancang untuk memudahkan pemerintah desa dalam penatausahaan keuangan desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Aplikasi ini mengakomodasi semua peraturan menyangkut keuangan desa, didesain terhubung kepada pengguna serta bersahabat sebagai aplikasi desktop, dan mempunyai cara pengawasan yang efisien untuk mendapatkan data finansial keuangan yang akurat.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa berfungsi untuk mengakomodasi seluruh proses pengelolaan keuangan desa, termasuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Manfaat dari pelaporan keuangan desa meliputi penilaian efektivitas, efisiensi, dan kemanfaatan sumber daya ekonomi desa dalam satu tahun anggaran, serta mengetahui nilai kekayaan bersih desa hingga posisi terakhir periode pelaporan. Ini juga berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja aparatur desa.

2.1.3 Hambatan Dalam Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa

Program siskeudes merupakan perangkat dalam pengelolaan keuangan desa, serta dapat memberikan kemudahan bagi aparat desa dalam mengatur keuangan secara sistematis, tepat guna, serta optimal. Program ini telah dimanfaatkan secara efektif di Desa Umbu'asi Barat untuk pengelolaan keuangan secara online, meskipun sistem offline juga masih digunakan. Pemerintah Desa Umbu'asi Barat telah menerapkan aplikasi ini dengan baik, merasa terbantu dalam pengelolaan keuangan, dan operator desa telah menunjukkan kecakapan serta keakurasian dalam mengelola setiap langkah-langkah entri informasi.

Beberapa kendala dalam tahapan entri data kedalam program Siskeudes termasuk penangan yang sering mengalami gangguan, dalam proses input data. Untuk meminimalisir gangguan ini, sebaiknya menghubungi pihak pendamping desa yang telah memberikan pelatihan. Selain itu, tahapan penatausahaan juga cukup sulit karena memerlukan kecermatan untuk mencocokkan laporan dengan buku rekening bank. Kesalahan pada tahap ini dapat memengaruhi proses selanjutnya, sehingga dibutuhkan waktu lebih dan perangkat yang kompeten. Operator desa dalam mengelola program siskeudes harus memiliki pengalaman,

kompetensi, dan keahlian yang memadai untuk mengurangi kesalahan dalam penginputan.

2.1.4 Pengelolaan Keuangan Desa

Aplikasi Siskeudes dirancang untuk memajukan mutu manajemen keuangan desa. Prosedur manajemen keuangan desa dimulai dari perancangan serta penyusunan anggaran, termasuk RPJMdes yang mencakup pandangan dan maksud pimpinan desa, tujuan strategi pengembangan, dan kegiatan terencana. RKPDes adalah penjabaran RPJMdes untuk satu tahun, dan APBdes adalah rencana keuangan tahunan yang disetujui oleh pemerintah desa dan BPD. Pengelolaan keuangan desa harus sederhana namun tetap transparan dan akuntabel. Penting juga untuk mengidentifikasi risiko kesalahan administratif dan substantif yang bisa menyebabkan masalah hukum, terutama jika pimpinan desa serta aparatnya masih kurang kompetensi. Keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada pengelolaan keuangan desa yang baik.

2.1.5 Laporan Realisasi Anggaran

Pelaporan penggunaan keuangan disusun untuk menyoroti elemen-elemen penting seperti pemasukkan, pengeluaran, pengiriman dana, kekurangan dana, serta biaya-biaya yang dibutuhkan agar penyajiannya yang masuk akal. Pelaporan ini membandingkan realisasi pendapatan-penggunaan anggaran, pengeluaran, pengiriman dana, kekurangan dana penggunaan anggaran, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Penjelasan lebih rinci mengenai laporan ini terdapat dalam pembukuan pelaporan penggunaan anggaran, meliputi faktor-faktor penggunaan dana, seperti aturan keuangan, alasan selisih bahan dengan dana yang digunakan, dan perincian klarifikasi tambahan pada angka-angka yang dianggap perlu.

2.1.6 Format Laporan Realisasi Anggaran

**PEMERINTAH PUSAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0**

(dalam Rupiah)

| No | Uraian | Anggaran 20X1 | Realisasi 20X1 | (%) | Realisasi 20X0 |
|----|---|------------------|-------------------|-----|-------------------|
| 1 | PENDAPATAN | | | | |
| 2 | PENDAPATAN PERPAJAKAN | | | | |
| 3 | Pendapatan Pajak Penghasilan | xxx | xxx | xx | xxx |
| 4 | Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah | xxx | xxx | xx | xxx |
| 5 | Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan | xxx | xxx | xx | xxx |
| 6 | Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan | xxx | xxx | xx | xxx |
| 7 | Pendapatan Cukai | xxxx | xxxx | xx | xxxx |
| 8 | Pendapatan Bea Masuk | | | | |
| 9 | Pendapatan Pajak Ekspor | | | | |
| 10 | Pendapatan Pajak Lainnya | | | | |
| 11 | Jumlah Pendapatan Perpajakan (3 s/d 10) | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK | | | | |
| 14 | Pendapatan Sumber Daya Alam | xxx | xxx | xx | xxx |
| 15 | Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba | xxx | xxx | xx | xxx |
| 16 | Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya | xxx | xxx | xx | xxx |
| 17 | Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (14 s/d 16) | xxxx | xxxx | xx | xxxx |
| 18 | | | | | |
| 19 | PENDAPATAN HIBAH | | | | |
| 20 | Pendapatan Hibah | xxx | xxx | xx | xxx |
| 21 | Jumlah Pendapatan Hibah (20 s/d 20) | xxx | xxx | xx | xxx |
| 22 | JUMLAH PENDAPATAN (11 + 17 + 21) | xxxx | xxxx | xx | xxxx |
| 23 | | | | | |
| 24 | BELANJA | | | | |
| 25 | BELANJA OPERASI | xxx | xxx | xx | xxx |
| 26 | Belanja Pegawai | xxx | xxx | xx | xxx |
| 27 | Belanja Barang | xxx | xxx | xx | xxx |
| 28 | Bunga | xxx | xxx | xx | xxx |
| 29 | Subsidi | xxxx | xxxx | xx | xxxx |
| 30 | Hibah | | | | |
| 31 | Bantuan Sosial | | | | |
| 32 | Belanja Lain-lain | xxx | xxx | xx | xxx |
| 33 | Jumlah Belanja Operasi (26 s/d 32) | xxx | xxx | xx | xxx |
| 34 | | xxx | xxx | xx | xxx |
| 35 | BELANJA MODAL | xxx | xxx | xx | xxx |
| 36 | Belanja Tanah | xxx | xxx | xx | xxx |
| 37 | Belanja Peralatan dan Mesin | xxx | xxx | xx | xxx |
| 38 | Belanja Gedung dan Bangunan | xxx | xxx | xx | xxx |
| 39 | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | xxxx | xxxx | xx | xxxx |

| | | | | | |
|----|---|------|------|-----|------|
| 40 | Belanja Aset Tetap Lainnya | | | | |
| 41 | Belanja Aset Lainnya | XXX | XXX | XX | XXX |
| 42 | Jumlah Belanja Modal (36 s/d 41) | XXX | XXX | XX | XXX |
| 43 | JUMLAH BELANJA (33 + 42) | XXX | XXX | XX | XXX |
| 44 | | XXX | XXX | XX | XXX |
| 45 | TRANSFER | XXX | XXX | XX | XXX |
| 46 | DANA PERIMBANGAN | XXX | XXX | XX | XXX |
| 47 | Dana Bagi Hasil Pajak | XXXX | XXXX | XX | XXXX |
| 48 | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | | | | |
| 49 | Dana Alokasi Umum | | | | |
| 50 | Dana Alokasi Khusus | XXX | XXX | XX | XXX |
| 51 | Jumlah Dana Perimbangan (47 s/d 50) | XXX | XXXX | XX | XXXX |
| 52 | | | | | |
| 53 | TRANSFER LAINNYA (d disesuaikan dengan program yang ada) | | | | |
| 54 | Dana Otonomi Khusus | | | | |
| 55 | Dana Penyesuaian | XXX | XXX | XX | XXX |
| 56 | Jumlah Transfer Lainnya (54 s/d 55) | XXX | XXX | XX | XXX |
| 57 | JUMLAH TRANSFER (51 + 56) | XXX | XXXX | XX | XXXX |
| 58 | JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (43 + 57) | XXX | XXXX | XX | XXXX |
| 59 | | | | | |
| 60 | SURPLUS / DEFISIT (22 - 58) | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 61 | PEMBIAYAAN | | | | |
| 62 | PENERIMAAN | | | | |
| 63 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | | | | |
| 64 | Penggunaan SAL | XXX | XXX | XX | XXX |
| 65 | Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan | XXX | XXX | XX | XXX |
| 66 | Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi | XXX | XXX | XX | XXX |
| 67 | Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya | XXX | XXX | XX | XXX |
| 68 | Penerimaan dari Divestasi | XXX | XXX | XX | XXX |
| 69 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara | XXX | XXX | XX | XXX |
| 70 | Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank | XXX | XXX | XX | XXX |
| 71 | Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri (64 s/d 70) | XXX | XXX | XX | XXX |
| 72 | | XXX | XXX | XX | XXX |
| 73 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI | XXX | XXX | XX | XXX |
| 74 | Penerimaan Pinjaman Luar Negeri | XXX | XXX | XX | XXX |
| 75 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Lembaga Internasional | XXX | XXX | XX | XXX |
| 76 | Jumlah Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri (74 s/d 75) | XXXX | XXXX | XX | XXXX |
| 77 | JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN (71 + 76) | | | | |
| 78 | | | | | |
| 79 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | XXX | XXX | XX | XXX |
| 80 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI | XXX | XXX | XX | XXX |

| | | | | | |
|----|---|-----|-----|-----|-----|
| 81 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan | xxx | xxx | xx | xxx |
| 82 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi | xxx | xxx | xx | xxx |
| 83 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya | xxx | xxx | xx | xxx |
| 84 | Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) | xxx | xxx | xx | xxx |
| 85 | Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara | xxx | xxx | xx | xxx |
| 86 | Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | xxx | xxx | xx | xxx |
| 87 | Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri (81 s/d 86) | xxx | xxx | xx | xxx |
| 88 | | xxx | xxx | xx | xxx |
| 89 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI | xxx | xxx | xx | xxx |
| 90 | Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 91 | Pemberian Pinjaman kepada Lembaga Internasional | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 92 | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri (90 s/d 91) | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 93 | JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN (87 + 92) | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 94 | PEMBIAYAAN NETO (77 - 93) | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 95 | | | | | |
| 96 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (62 + 94) | xxx | xxx | xxx | xxx |

**PEMERINTAH PROVINSI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0**

(dalam Rupiah)

| No | Uraian | Anggaran 20X1 | Realisasi 20X1 | (%) | Realisasi 20X0 |
|----|--|------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| 1 | PENDAPATAN | | | | |
| 2 | PENDAPATAN ASLI DAERAH: | | | | |
| 3 | Pendapatan Pajak Daerah | xxx | xxx | xx | xxx |
| 4 | Pendapatan Retribusi Daerah | xxx | xxx | xx | xxx |
| 5 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | xxx | xxx | xx | xxx |
| 6 | Lain-lain PAD yang sah | xxx | xxx | xx | xxx |
| 7 | Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6) | xxxx | xxxx | xx | xxxx |
| 8 | | | | | |
| 9 | PENDAPATAN TRANSFER | | | | |
| 10 | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN | | | | |
| 11 | Dana Bagi Hasil Pajak | xxx | xxx | xx | xxx |
| 12 | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | xxx | xxx | xx | xxx |
| 13 | Dana Alokasi Umum | xxx | xxx | xx | xxx |
| 14 | Dana Alokasi Khusus | xxx | xxx | xx | xxx |
| 15 | Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14) | xxxx | xxxx | xx | xxxx |
| 16 | | | | | |
| 17 | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA | | | | |
| 18 | Dana Otonomi Khusus | xxx | xxx | xx | xxx |
| 19 | Dana Penyesuaian | xxx | xxx | xx | xxx |
| 20 | Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s/d 19) | xxxx | xxxx | xx | xxxx |
| 21 | Total Pendapatan Transfer (15 + 20) | xxxx | xxxx | xx | xxxx |
| 22 | | | | | |
| 23 | LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH | | | | |
| 24 | Pendapatan Hibah | xxx | xxx | xx | xxx |
| 25 | Pendapatan Dana Darurat | xxx | xxx | xx | xxx |
| 26 | Pendapatan Lainnya | xxx | xxx | xx | xxx |
| 27 | Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah (24 s/d 26) | xxx | xxx | xx | xxx |
| 28 | JUMLAH PENDAPATAN (7 + 21 + 27) | xxxx | xxxx | xx | xxxx |
| 29 | BELANJA | | | | |
| 30 | BELANJA OPERASI | | | | |
| 31 | Belanja Pegawai | xxx | xxx | xx | xxx |
| 32 | Belanja Barang | xxx | xxx | xx | xxx |
| 33 | Bunga | xxx | xxx | xx | xxx |
| 34 | Subsidi | xxx | xxx | xx | xxx |
| 35 | Hibah | xxx | xxx | xx | xxx |
| 36 | Bantuan Sosial | xxx | xxx | xx | xxx |
| 37 | Jumlah Belanja Operasi (31 s/d 36) | xxxx | xxxx | xx | xxxx |
| 38 | | | | | |

| | | | | | |
|----|---|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 39 | BELANJA MODAL | | | | |
| 40 | Belanja Tanah | xxx | xxx | xx | xxx |
| 41 | Belanja Peralatan dan Mesin | xxx | xxx | xx | xxx |
| 42 | Belanja Gedung dan Bangunan | xxx | xxx | xx | xxx |
| 43 | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | xxx | xxx | xx | xxx |
| 44 | Belanja Aset Tetap Lainnya | xxx | xxx | xx | xxx |
| 45 | Belanja Aset Lainnya | xxx | xxx | xx | xxx |
| 46 | Jumlah Belanja Modal (40 s/d 45) | xxxx | xxxx | xx | xxxx |
| 47 | | | | | |
| 48 | BELANJA TAK TERDUGA | | | | |
| 49 | Belanja Tak Terduga | xxx | xxx | xx | xxx |
| 50 | Jumlah Belanja Tak Terduga (49 s/d 49) | xxx | xxxx | xx | xxxx |
| 51 | Jumlah Belanja (37 + 46 + 50) | xxx | xxxx | xx | xxxx |
| 52 | | | | | |
| 53 | TRANSFER | | | | |
| 54 | TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA | | | | |
| 55 | Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota | xxx | xxx | xx | xxx |
| 56 | Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota | xxx | xxx | xx | xxx |
| 57 | Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota | xxx | xxx | xx | xxx |
| 58 | Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan ke Kab./Kota (55 s/d 57) | xxx | xxxx | xx | xxxx |
| 59 | JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (51 + 58) | xxx | xxxx | xx | xxxx |
| 60 | | | | | |
| 61 | SURPLUS/DEFISIT (28 - 59) | xxx | xxx | xx | xxx |
| | | | | x | |
| 62 | | | | | |
| 63 | PEMBIAYAAN | | | | |
| 64 | | | | | |
| 65 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | | | | |
| 66 | Penggunaan SiLPA | xxx | xxx | xx | xxx |
| 67 | Pencairan Dana Cadangan | xxx | xxx | xx | xxx |
| 68 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | xxx | xxx | xx | xxx |
| 69 | Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat | xxx | xxx | xx | xxx |
| 70 | Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya | xxx | xxx | xx | xxx |
| 71 | Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank | xxx | xxx | xx | xxx |
| 72 | Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank | xxx | xxx | xx | xxx |
| 73 | Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi | xxx | xxx | xx | xxx |
| 74 | Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya | xxx | xxx | xx | xxx |
| 75 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara | xxx | xxx | xx | xxx |
| 76 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | xxx | xxx | xx | xxx |
| 77 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya | xxx | xxx | xx | xxx |
| 78 | Jumlah Penerimaan (66 s/d 77) | xxxx | xxxx | xx | xxxx |
| 79 | | | | | |

| | | | | | |
|----|--|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 80 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | | | | |
| 81 | Pembentukan Dana Cadangan | xxx | xxx | xx | xxx |
| 88 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | xxx | xxx | xx | xxx |
| 82 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat | xxx | xxx | xx | xxx |
| 83 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya | xxx | xxx | xx | xxx |
| 84 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank | xxx | xxx | xx | xxx |
| 85 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank | xxx | xxx | xx | xxx |
| 86 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi | xxx | xxx | xx | xxx |
| 87 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya | xxx | xxx | xx | xxx |
| 89 | Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara | xxx | xxx | xx | xxx |
| 90 | Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | xxx | xxx | xx | xxx |
| 91 | Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya | xxx | xxx | xx | xxx |
| 92 | Jumlah Pengeluaran (81 s/d 91) | xxx | xxx | xx | xxx |
| 93 | PEMBIAYAAN NETO (78 - 92) | xxxx | xxxx | xx | xxxx |
| 94 | | | | | |
| 95 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (61 + 93) | xxxx | xxxx | xx | xxxx |

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

| No | URAIAN | Anggaran 20x1 | Realisasi 20x1 | % | Realisasi 20x0 |
|----|--|------------------|-------------------|----|-------------------|
| 1 | PENDAPATAN | | | | |
| 2 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | | | |
| 3 | Pendapatan Pajak Daerah | xxx | xxx | xx | xxx |
| 4 | Pendapatan Retribusi Daerah | xxx | xxx | xx | xxx |
| 5 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | xxx | xxx | xx | xxx |
| 6 | Lain-lain PAD yang sah | xxx | xxx | xx | xxx |
| 7 | Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6) | xxxx | xxxx | xx | xxxx |
| 8 | | | | | |
| 9 | PENDAPATAN TRANSFER | | | | |
| 10 | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN | | | | |
| 11 | Dana Bagi Hasil Pajak | xxx | xxx | xx | xxx |
| 12 | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | xxx | xxx | xx | xxx |
| 13 | Dana Alokasi Umum | xxx | xxx | xx | xxx |
| 14 | Dana Alokasi Khusus | xxx | xxx | xx | xxx |
| 15 | Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14) | xxxx | xxxx | xx | xxxx |
| 16 | | | | | |
| 17 | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA | | | | |
| 18 | Dana Otonomi Khusus | xxx | xxx | xx | xxx |
| 19 | Dana Penyesuaian | xxx | xxx | xx | xxx |
| 20 | Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19) | xxxx | xxxx | xx | xxxx |
| 21 | | | | | |
| 22 | TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI | | | | |
| 23 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | xxx | xxx | xx | xxx |
| 24 | Pendapatan Bagi Hasil Lainnya | xxx | xxx | xx | xxx |
| 25 | Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24) | xxxx | xxxx | xx | xxxx |
| 26 | Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25) | xxxx | xxxx | xx | xxxx |
| 27 | | | | | |
| 28 | LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH | | | | |
| 29 | Pendapatan Hibah | xxx | xxx | xx | xxx |
| 30 | Pendapatan Dana Darurat | xxx | xxx | xx | xxx |
| 31 | Pendapatan Lainnya | xxx | xxx | xx | xxx |
| 32 | Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31) | xxx | xxx | xx | xxx |
| 33 | JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32) | xxxx | xxxx | xx | xxxx |
| 34 | | | | | |
| 35 | BELANJA | | | | |
| 36 | BELANJA OPERASI | | | | |
| 37 | Belanja Pegawai | xxx | xxx | xx | xxx |
| 38 | Belanja Barang | xxx | xxx | xx | xxx |

| | | | | | |
|----|--|------|------|-----|------|
| 39 | Bunga | xxx | xxx | xx | xxx |
| 40 | Subsidi | xxx | xxx | xx | xxx |
| 41 | Hibah | xxx | xxx | xx | xxx |
| 42 | Bantuan Sosial | xxx | xxx | xx | xxx |
| 43 | Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42) | xxxx | xxxx | xx | xxxx |
| 44 | | | | | |
| 45 | BELANJA MODAL | | | | |
| 46 | Belanja Tanah | xxx | xxx | xx | xxx |
| 47 | Belanja Peralatan dan Mesin | xxx | xxx | xx | xxx |
| 48 | Belanja Gedung dan Bangunan | xxx | xxx | xx | xxx |
| 49 | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | xxx | xxx | xx | xxx |
| 50 | Belanja Aset Tetap Lainnya | xxx | xxx | xx | xxx |
| 51 | Belanja Aset Lainnya | xxx | xxx | xx | xxx |
| 52 | Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51) | xxxx | xxxx | xx | xxxx |
| 53 | | | | | |
| 54 | BELANJA TAK TERDUGA: | | | | |
| 55 | Belanja Tak Terduga | xxx | xxx | xx | xxx |
| 56 | Jumlah Belanja Tak Terduga (55 s/d 55) | xxx | xxx | xx | xxx |
| 57 | JUMLAH BELANJA (43 + 52 + 56) | xxxx | xxxx | xx | xxxx |
| 58 | | | | | |
| 59 | TRANSFER | | | | |
| 60 | TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA | | | | |
| 61 | Bagi Hasil Pajak | xxx | xxx | xx | xxx |
| 62 | Bagi Hasil Retribusi | xxx | xxx | xx | xxx |
| 63 | Bagi Hasil Pendapatan Lainnya | xxx | xxx | xx | xxx |
| 64 | JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA (61 s/d 63) | xxx | xxx | xx | xxx |
| 65 | JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (57 + 64) | | | | |
| 66 | | | | | |
| 67 | SURPLUS/DEFISIT (33 - 65) | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 68 | | | | | |
| 69 | PEMBIAYAAN | | | | |
| 70 | | | | | |
| 71 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | | | | |
| 72 | Penggunaan SiLPA | xxx | xxx | xx | xxx |
| 73 | Pencairan Dana Cadangan | xxx | xxx | xx | xxx |
| 74 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | xxx | xxx | xx | xxx |
| 75 | Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat | xxx | xxx | xx | xxx |
| 76 | Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya | xxx | xxx | xx | xxx |
| 77 | Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank | xxx | xxx | xx | xxx |
| 78 | Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank | xxx | xxx | xx | xxx |
| 79 | Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi | xxx | xxx | xx | xxx |
| 80 | Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya | xxx | xxx | xx | xxx |
| 81 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara | xxx | xxx | xx | xxx |
| 82 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | xxx | xxx | xx | xxx |
| 83 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya | xxx | xxx | xx | xxx |

| | | | | | |
|----|---|------|------|----|------|
| 84 | Jumlah Penerimaan (72 s/d 83) | xxxx | xxxx | xx | xxxx |
| 85 | | | | | |
| 86 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | | | | |
| 87 | Pembentukan Dana Cadangan | xxx | xxx | xx | xxx |
| 88 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | xxx | xxx | xx | xxx |
| 89 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat | xxx | xxx | xx | xxx |
| 90 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya | xxx | xxx | xx | xxx |
| 91 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank | xxx | xxx | xx | xxx |
| 92 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank | xxx | xxx | xx | xxx |
| 93 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi | xxx | xxx | xx | xxx |
| 88 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya | xxx | xxx | xx | xxx |
| 89 | Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara | xxx | xxx | xx | xxx |
| 90 | Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | xxx | xxx | xx | xxx |
| 91 | Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya | xxx | xxx | xx | xxx |
| 92 | Jumlah Pengeluaran (87 s/d 91) | xxx | xxx | xx | xxx |
| 93 | PEMBIAYAAN NETO (84 - 92) | xxxx | xxxx | xx | xxxx |
| 94 | | | | | |
| 95 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (67 + 93) | xxxx | xxxx | xx | xxxx |

2.2 Peneliti Terdahulu

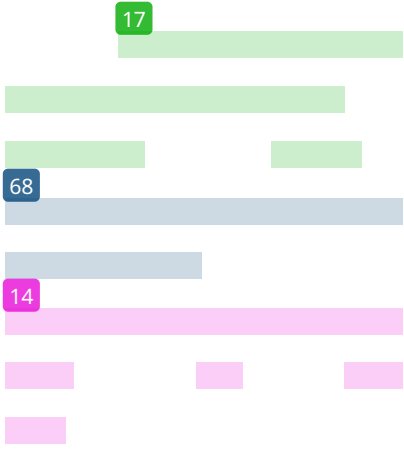
Penelitian terdahulu merupakan hasil-hasil sebelumnya serta menemukan gagasan peneliti pada studi berikutnya, sekaligus membantu peneliti mempromosikan serta menunjukkan orisinalitas penelitian mereka. Di bagian ini, peneliti menyertakan hasil-hasil penelitian yang berkaitan pada topik yang akan diteliti, yang diterangkan secara tabel dibawah ini.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

| Nama Peneliti | Judul Penelitian | Jenis Penelitian | Hasil Penelitian |
|-------------------------------|--|-------------------------|--|
| Jehan M. Malahika, dkk (2018) | Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Pada Organisasi Pemerintahan Desa | Kuantitatif | Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi Sistem Keuangan Desa telah berlangsung dengan baik, (2) Prosedur pemanfaatan siskeudes mengikuti empat tahapan: perencanaan, Pelaksanaan, pengadministrasian, dan Pelaporan, dan (3) Sistem Keuangan Desa memberikan dampak positif pada kinerja setiap karyawan. |
| Eleuterius Tri Kurnia (2019) | Analisis Persepsi Aparatur Desa Terhadap Penerimaan Dan Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa | Deskriptif Kualitatif | Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa persepsi kegunaan dan minat perilaku dalam menggunakan teknologi tidak memiliki dampak nyata pada penggunaan teknologi itu sendiri. Sementara itu, pengalaman terbukti tidak mempengaruhi persepsi kegunaan, tetapi |



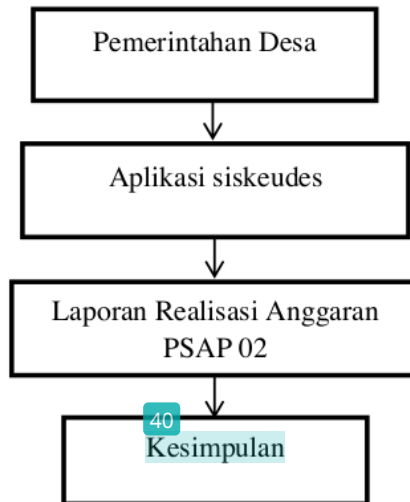
Horizontal bar chart element.



2.3 Kerangka Konseptual

Menurut Sugiyono (2017:60), kerangka konseptual merupakan model gagasan yang melukiskan hubungan teori dan berbagai faktor yang diasumsikan sebagai masalah penting. Kerangka berpikir ini berfungsi sebagai panduan dalam penelitian, dan materinya merupakan tanggapan atas perumusan masalah mengacu pada tinjauan teori. Oleh karena itu, setelah teori yang telah dijelaskan, maka kerangka berpikir bisa dirancang seperti dibawah ini:

Gambar 2.3 Kerangka Konseptual



BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

3.1.1 Sejarah Singkat Desa Umbu'asi Barat

Desa Umbu'asi Barat didirikan tahun 2009 yang merupakan hasil gabungan kampung pada saat itu dikampung hilila'edo. Seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman dari tahun ke tahun, Umbu'asi Barat mengalami perkembangan dibidang kependudukan dan perkembangan perekonomian dibidang pertanian.

Pada perkembangan dalam enam periode terakhir Jabatan Kepala Desa Desa Umbu'asi Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

| No | Masa | Nama Kepala Desa | Keterangan |
|----|-----------------------|------------------|------------|
| 1 | Tahun 2009-2012 | ELIZAMA WARUWU | |
| 2 | Tahun 2012-2013 | SUDIRMAN WARUWU | |
| 3 | Tahun 2013-2015 | ELIZAMA WARUWU | |
| 4 | Tahun 2015-2016 | ROZAMA NDRURU | |
| 5 | Tahun 2017-2020 | ELIZAMA WARUWU | |
| 6 | Tahun 2020 – Sekarang | WELIS NDRURU | |

3.1.2 Visi dan Misi

Visi : Terwujudnya masyarakat yang mandiri, nyaman, tertip, serta sejahtera dan peduli.

Misi :

1. Meningkatkan manajemen pemerintahan yang demokratis, transparan, teratur, serta keikutsertaan secara partisipasi.
2. Memajukan kualitas layanan masyarakat
3. Memajukan integritas, kerjasama, serta keterlibatan warga dalam menumbuhkan desa yang tenteram serta rukun.
4. Memajukan penghasilan warga berdasarkan aturan ekonomi kerakyatan, memajukan hasil pertanian serta pembangunan infrastruktur pedesaan.
5. Memajukan mutu sumber daya manusia, menggunakan potensi sumber daya alam, keterlibatan kaum ibu, dan menumbuhkan nilai-nilai religi dtengah masyarakat desa.
6. Memastikan swadaya ekonomi dengan meningkatkan serta mewadahi kebutuhan Perlengkapan dan fasilitas desa.

3.1.3 Program Kerja

1. Bidang Pemerintahan

1. Memajukan layanan masyarakat serta menerapkan cara layanan yang humanis.
2. Perancangan pengembangan dilakukan dengan partisipasi serta transparan, dengan mengelola anggaran dana desa yang terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan.

3. Meningkatkan kemitraan dan sinergi bersama Badan Permusyawaratan Desa.

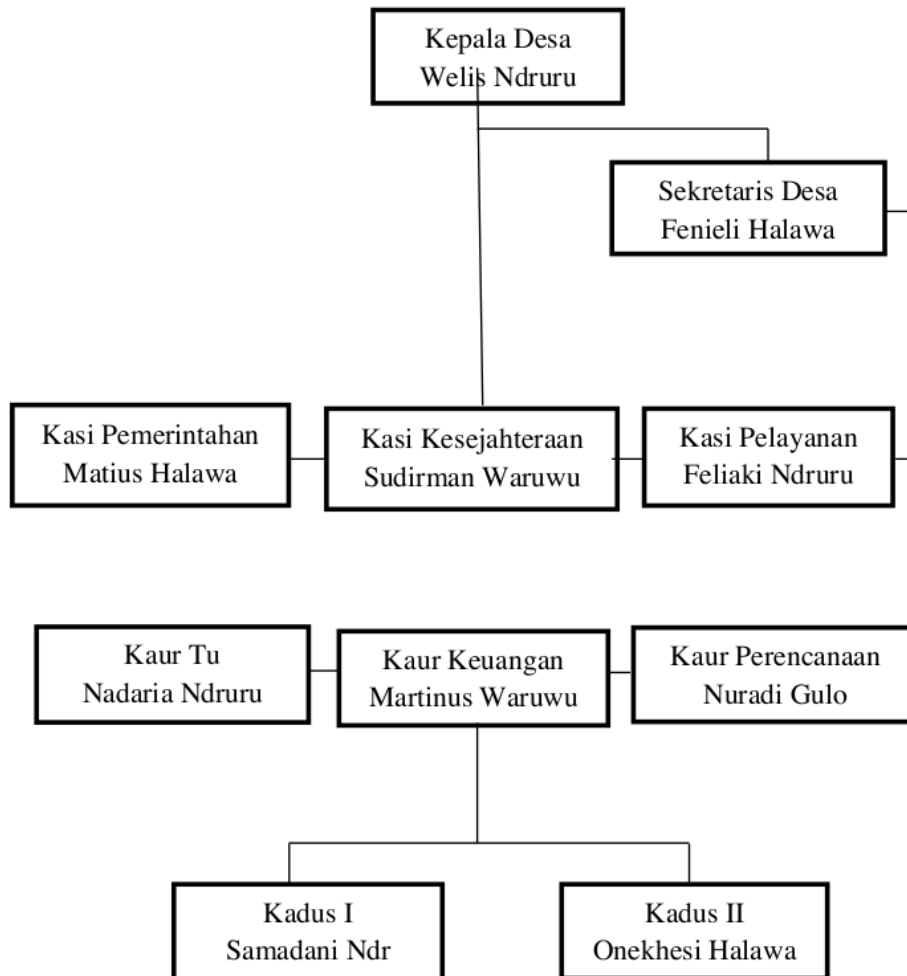
2. Bidang Pembangunan dan pelestarian hasil pembangunan

1. Memajukan pengembangan perlengkapan dan fasilitas kantor desa.
2. Memajukan penembangan sarana transportasi serta jembatan.
3. Memajukan kemitraan bersama pihak yang berkompetensi dibidang penyalur sumber energy listrik di desa.
4. Mengidentifikasi perlengkapan dan fasilitas di desa yang sudah tidak layak guna.

3. Bidang Kesehatan

1. Memajukan pengembangan perlengkapan dan fasilitas kesehatan, termasuk puskesmas pembantu dan posyandu.
2. Membangun pos perlindungan desa di semua dusun yang masih belum terakses di puskesmas pembantu.
3. Memajukan layanan kesehatan serta menyediakan ambulans untuk penanganan cepat untuk warga.
4. Pemberian upah/sukarela untuk kader posyandu dan kader Bina Keluarga Balita melalui anggaran dana desa berdasarkan regulasi yang berlaku.

3.1.3 Struktur Organisasi



Gambar 3.1 Struktur Organisasi

3.2 Pembahasan

3.2.1 Tata Cara Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa

Penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) oleh pemerintah desa diawali dengan pengajuan permohonan dari pemerintah daerah kepada Kementerian Dalam Negeri atau perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) setempat. Tujuan utama dari permohonan ini adalah untuk memastikan bahwa aplikasi Siskeudes dapat dikoordinasikan dan diterapkan secara konsisten di seluruh desa dalam yurisdiksi pemerintah daerah tersebut. Selanjutnya, persetujuan untuk menggunakan aplikasi Siskeudes diberikan melalui penerbitan kode resmi oleh BPKP dan Kementerian Dalam Negeri. Setelah mendapatkan persetujuan, proses penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dapat dilanjutkan melalui tahapan-tahapan berikut:

a. Login

Dalam mengakses program sistem keuangan desa (Siskeudes), pengguna harus mengisi menu login user dengan benar. Tujuan dari login user adalah memberikan perlindungan data dalam aplikasi Siskeudes serta mengonfirmasi hanya pengguna yang memiliki otoritas bisa mengaksesnya. *Login user* menginformasikan jenjang otoritas penggunaan aplikasi yakni level operator bagi pemerintah desa, level supervisor bagi pemerintah kecamatan, dan level admin bagi pemerintah daerah.

Gambar 1. Tampilan Login Aplikasi Siskeudes



The image shows a login window for the Siskeudes application. The window has a title bar that says "Login User" and a main header "AUTHENTIKASI USER". Below the header, there are three input fields: "User ID" containing the text "user", "Password" containing masked characters "****", and "Tahun Anggaran" containing the text "2019". To the right of the "Tahun Anggaran" field, there is a checked checkbox labeled "Default". At the bottom of the window, there are two buttons: "OK" and "Batal".

Sesudah pengisian user ID, kata sandi, serta tahun anggaran, pilih dan click tanda "OK." Bagi pemerintahan desa, login aplikasi Siskeudes diisi dengan user ID: "user" dan password: "user" Kemudian, login user akan diatur oleh admin Siskeudes pemerintah daerah, sehingga tiap desa akan menerima user ID dan password yang berbeda..

Dalam memproteksi kerahasiaan user ID dan password, aplikasi Siskeudes menyediakan menu bila mengganti user ID dan password. Caranya dengan memasukkan user ID dan password lama, kemudian memasukkan user ID dan password baru. Konfirmasi diisi dengan password baru untuk memastikan kesesuaian password yang baru.

Gambar 2. Tampilan Menu Ganti *User ID* dan *Password* Siskeudes



The screenshot shows a web form titled "Ganti UserID" with a green header. Below the header, the main title is "GANTI ID USER DAN PASSWORD". The form is divided into two main sections. The first section contains two input fields: "User ID" (with the text "admin" entered) and "Password". The second section contains three input fields: "UserID Baru", "Password", and "Konfirmasi". At the bottom of the form, there are two buttons: "Ganti" and "Batal".

Dianjurkan untuk pemerintahan desa agar merubah kata sandi secara rutin guna memproteksi keamanan user ID dan password yang digunakan. Setelah login, akan muncul beberapa alat di pojok kiri atas layar. Selanjutnya, lakukan double klik pada tulisan "Data Entri".

Gambar 3. Tampilan Awal Siskeudes setelah login



Pada umumnya, menu "Data Entri" diperuntukkan untuk pemerintah desa serta dibagi menjadi empat kelompok sesuai dengan tahapan pengelolaan keuangan desa: perencanaan, penganggaran, penatausahaan,

dan pelaporan. Tahapan pengelolaan keuangan desa menggunakan aplikasi Siskeudes akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Tahapan Perencanaan

Tahap perencanaan dimulai dengan menetapkan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk mencapainya, merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh, dan akhirnya mencapai tujuan tersebut (Bastian, 2015). Perencanaan dilaksanakan pemerintahan desa dengan warga dengan musyawarah desa untuk menerima keinginan warga dan merencanakan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah desa harus memerhatikan skala prioritas pembangunan desa untuk memastikan pembangunan merata.

b. Tahapan Penganggaran

Tahap – tahap penganggaran dilakukan setelah RKP desa ditentukan, langkah ini akan disusun APDB desa sesuai RKP desa. APDB desa merupakan anggaran tahunan pemerintah desa yang memuat program atau kegiatan yang akan dilaksanakan yang menjadi kewenangan pemerintah desa. Penganggaran belanja harus didukung oleh sumber pendapatan yang kokoh dan berdasarkan landasan hukum yang berlaku (BPKP, 2016)

c. Tahapan Penatausahaan

Tahap penyusunan anggaran (penganggaran) di tingkat desa dilaksanakan setelah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa ditetapkan. Pada tahap ini, pemerintah desa menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa yang diselaraskan dengan RKP Desa. APB Desa merupakan anggaran tahunan pemerintah desa yang mencakup berbagai program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan desa. Perencanaan belanja (pengeluaran) dalam APB Desa harus didukung oleh kepastian

penerimaan (pendapatan) yang memadai dan berlandaskan pada peraturan hukum yang sesuai. (BPKP, 2016).

d. Tahapan Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Proses pertanggungjawaban, adanya hasil dari pelaporan keuangan yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas program kerja atau anggaran yang telah direalisasikan, seperti dalam hal pembangunan. Laporan pertanggungjawaban ini hanya akan muncul jika semua tahapan sebelumnya dilalui dengan benar. Bila ada kesalahan pada salah satu tahap, laporan pertanggungjawaban tidak akan muncul di sistem. Oleh karena itu, ketelitian dan fokus sangat penting saat menginput dan mengolah data dari tahap perencanaan hingga pelaporan. Laporan keuangan yang dihasilkan akan digunakan untuk melaporkan anggaran yang telah dianggarkan sebelumnya, mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana. Setelah laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dihasilkan, Kepala Desa wajib melaporkannya secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

3.2.3 Administrasi Data User

Menu Administrasi Data User pada aplikasi Siskeudes digunakan untuk menetapkan identitas pengguna, seperti user ID, password, dan level akses pengguna, sebagaimana dijelaskan pada menu Login. Menu Parameter Data hanya dapat diakses oleh pengguna dengan level administrator di tingkat Kabupaten/Kota. Sementara itu, menu-menu lainnya dapat diakses oleh operator di tingkat kecamatan (level supervisor) dan operator di tingkat desa.



34 Menu Administrasi Data User pada aplikasi Siskeudes digunakan untuk menetapkan identitas pengguna, seperti user ID, password, dan level akses pengguna, sebagaimana dijelaskan pada menu Login. Dalam menu ini juga ditetapkan batasan kewenangan bagi pengguna aplikasi untuk mengakses fitur-fitur yang tersedia. Administrator menentukan batasan menu yang dapat diakses oleh pengguna dengan level supervisor di tingkat kecamatan dan pengguna dengan level operator di tingkat desa pada Aplikasi Siskeudes. Menu Parameter Data hanya dapat diakses oleh pengguna dengan level administrator di tingkat Kabupaten/Kota.

3.2.4 Laporan Realisasi Anggaran Pemerintahan Desa Umbu'asi Barat

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA UMBUASI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023

Realisasi s.d 31/12/2023

| KODE REK | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | LEBIH/(KURANG) (Rp) |
|----------|-----------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 4. | PENDAPATAN | | | |
| | 4.2. | Pendapatan Transfer | 1.059.729.895,00 | 1.059.729.895,00 | 0,00 |
| | 4.2.1. | Dana Desa | 922.522.000,00 | 922.522.000,00 | 0,00 |
| | 4.2.1.01. | Dana Desa | 922.522.000,00 | 922.522.000,00 | 0,00 |
| | 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 137.207.895,00 | 137.207.895,00 | 0,00 |
| | 4.2.3.01. | Alokasi Dana Desa | 137.207.895,00 | 137.207.895,00 | 0,00 |
| | | JUMLAH PENDAPATAN | 1.059.729.895,00 | 1.059.729.895,00 | 0,00 |
| | 5. | BELANJA | | | |
| 1 | | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DES | 442.471.490,00 | 442.463.595,00 | 7.895,00 |
| 1.1 | | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan | 354.971.490,00 | 354.963.595,00 | 7.895,00 |
| 1.1.1 | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 5.1. | Belanja Pegawai | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 5.1.1.01. | Penghasilan Tetap Kepala Desa | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 5.1.1.02. | Tunjangan Kepala Desa | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 158.400.000,00 | 158.400.000,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 5.1. | Belanja Pegawai | 158.400.000,00 | 158.400.000,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat D | 158.400.000,00 | 158.400.000,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 5.1.2.01. | Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 79.200.000,00 | 79.200.000,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 5.1.2.02. | Tunjangan Perangkat Desa | 79.200.000,00 | 79.200.000,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 82.096.490,00 | 82.088.595,00 | 7.895,00 |
| 1.1.4 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 82.096.490,00 | 82.088.595,00 | 7.895,00 |
| 1.1.4 | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 20.096.490,00 | 20.088.595,00 | 7.895,00 |
| 1.1.4 | 5.2.1.01. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 5.096.490,00 | 5.088.595,00 | 7.895,00 |
| 1.1.4 | 5.2.1.05. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | 5.2.1.06. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | 5.2.1.07. | Belanja Bahan Material | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | 5.2.2.02. | Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | 5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 38.000.000,00 | 38.000.000,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | 5.2.3.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 38.000.000,00 | 38.000.000,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | | Penyediaan Tunjangan BPD | 28.800.000,00 | 28.800.000,00 | 0,00 |

Realisasi s.d 31/12/2023

| KODE REK | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | LEBIH/(KURANG) (Rp) |
|------------|-----------|--|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1.5 | 5.1. | Belanja Pegawai | 28.800.000,00 | 28.800.000,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | 5.1.4. | Tunjangan BPD | 28.800.000,00 | 28.800.000,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | 5.1.4.01. | Tunjangan Kedudukan BPD | 28.800.000,00 | 28.800.000,00 | 0,00 |
| 1.1.6 | | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 0,00 |
| 1.1.6 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 0,00 |
| 1.1.6 | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 0,00 |
| 1.1.6 | 5.2.1.01. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| 1.1.6 | 5.2.1.06. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 |
| 1.1.6 | 5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 1.1.6 | 5.2.3.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 1.1.8 | | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 27.675.000,00 | 27.675.000,00 | 0,00 |
| 1.1.8 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 27.675.000,00 | 27.675.000,00 | 0,00 |
| 1.1.8 | 5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| 1.1.8 | 5.2.3.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| 1.1.8 | 5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep. | 22.675.000,00 | 22.675.000,00 | 0,00 |
| 1.1.8 | 5.2.7.01. | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k | 22.675.000,00 | 22.675.000,00 | 0,00 |
| <u>1.2</u> | | <u>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</u> | <u>72.500.000,00</u> | <u>72.500.000,00</u> | <u>0,00</u> |
| 1.2.1 | | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 72.500.000,00 | 72.500.000,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 5.3. | Belanja Modal | 72.500.000,00 | 72.500.000,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan | 72.500.000,00 | 72.500.000,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 5.3.2.02. | Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Stud | 22.500.000,00 | 22.500.000,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 5.3.2.03. | Belanja Modal Peralatan Komputer | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 5.3.2.04. | Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 5.3.2.10. | Belanja Modal Mesin | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| <u>1.4</u> | | <u>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,</u> | <u>15.000.000,00</u> | <u>15.000.000,00</u> | <u>0,00</u> |
| 1.4.3 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | 5.2.1.01. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | 5.2.1.05. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | 5.2.1.06. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 1.4.4 | | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 |
| 1.4.4 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 |
| 1.4.4 | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 |
| 1.4.4 | 5.2.1.01. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 1.4.4 | 5.2.1.05. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 |

Realisasi s.d 31/12/2023

| KODE REK | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | LEBIH/(KURANG) (Rp) |
|------------|-----------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.4.4 | 5.2.1.06. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 |
| 2 | | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 441.747.000,00 | 441.740.800,00 | 6.200,00 |
| 2.2 | | Sub Bidang Kesehatan | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif) | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | 5.2.1.06. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | 5.2.2.03. | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| 2.3 | | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 421.747.000,00 | 421.740.800,00 | 6.200,00 |
| 2.3.5 | | Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll) | 150.938.500,00 | 150.938.500,00 | 0,00 |
| 2.3.5 | 5.3. | Belanja Modal | 150.938.500,00 | 150.938.500,00 | 0,00 |
| 2.3.5 | 5.3.5. | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | 150.938.500,00 | 150.938.500,00 | 0,00 |
| 2.3.5 | 5.3.5.02. | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja | 39.387.500,00 | 39.387.500,00 | 0,00 |
| 2.3.5 | 5.3.5.03. | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 111.551.000,00 | 111.551.000,00 | 0,00 |
| 2.3.12 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) | 270.808.500,00 | 270.802.300,00 | 6.200,00 |
| 2.3.12 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 20.766.200,00 | 20.760.000,00 | 6.200,00 |
| 2.3.12 | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 8.166.200,00 | 8.160.000,00 | 6.200,00 |
| 2.3.12 | 5.2.1.01. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 2.3.12 | 5.2.1.05. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 2.3.12 | 5.2.1.06. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 |
| 2.3.12 | 5.2.1.07. | Belanja Bahan Material | 1.166.200,00 | 1.160.000,00 | 6.200,00 |
| 2.3.12 | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 8.400.000,00 | 8.400.000,00 | 0,00 |
| 2.3.12 | 5.2.2.01. | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | 8.400.000,00 | 8.400.000,00 | 0,00 |
| 2.3.12 | 5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 0,00 |
| 2.3.12 | 5.2.3.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 0,00 |
| 2.3.12 | 5.3. | Belanja Modal | 250.042.300,00 | 250.042.300,00 | 0,00 |
| 2.3.12 | 5.3.5. | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | 250.042.300,00 | 250.042.300,00 | 0,00 |
| 2.3.12 | 5.3.5.02. | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja | 40.182.000,00 | 40.182.000,00 | 0,00 |
| 2.3.12 | 5.3.5.03. | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 202.330.600,00 | 202.330.600,00 | 0,00 |
| 2.3.12 | 5.3.5.04. | Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan | 7.529.700,00 | 7.529.700,00 | 0,00 |
| 3 | | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 87.000.000,00 | 84.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 3.2 | | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 |
| 3.2.3 | | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| 3.2.3 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| 3.2.3 | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| 3.2.3 | 5.2.1.08. | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |

Realisasi s.d 31/12/2023

| KODE REK | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | LEBIH/(KURANG) (Rp) |
|------------|-----------|---|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.2.4 | | Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 |
| 3.2.4 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 |
| 3.2.4 | 5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 |
| 3.2.4 | 5.2.6.04. | Belanja Pemeliharaan Bangunan | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 |
| <u>3.3</u> | | <u>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</u> | <u>38.000.000,00</u> | <u>35.000.000,00</u> | <u>3.000.000,00</u> |
| 3.3.3 | | Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa | 23.000.000,00 | 20.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 3.3.3 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 23.000.000,00 | 20.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 3.3.3 | 5.2.1. | Belanja Barang Pertengkapan | 23.000.000,00 | 20.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 3.3.3 | 5.2.1.06. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| 3.3.3 | 5.2.1.09. | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 18.000.000,00 | 15.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 3.3.5 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 |
| 3.3.5 | 5.3. | Belanja Modal | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 |
| 3.3.5 | 5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 |
| 3.3.5 | 5.3.4.04. | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 |
| <u>3.4</u> | | <u>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</u> | <u>14.000.000,00</u> | <u>14.000.000,00</u> | <u>0,00</u> |
| 3.4.1 | | Pembinaan Lembaga Adat | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 3.4.1 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 3.4.1 | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 3.4.1 | 5.2.2.03. | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 3.4.2 | | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 3.4.2 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 3.4.2 | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 3.4.2 | 5.2.2.03. | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 3.4.3 | | Pembinaan PKK | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 |
| 3.4.3 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 |
| 3.4.3 | 5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 |
| 3.4.3 | 5.2.3.03. | Belanja Kursus Pelatihan | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 |
| <u>4</u> | | <u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u> | <u>10.000.000,00</u> | <u>10.000.000,00</u> | <u>0,00</u> |
| <u>4.3</u> | | <u>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</u> | <u>10.000.000,00</u> | <u>10.000.000,00</u> | <u>0,00</u> |
| 4.3.2 | | Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 |
| 4.3.2 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 |
| 4.3.2 | 5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 |
| 4.3.2 | 5.2.3.03. | Belanja Kursus Pelatihan | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 |
| <u>5</u> | | <u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT</u> | <u>93.600.000,00</u> | <u>93.600.000,00</u> | <u>0,00</u> |
| 5.3 | | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 93.600.000,00 | 93.600.000,00 | 0,00 |

Realisasi s.d 31/12/2023

| KODE REK | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | LEBIH/(KURANG) (Rp) |
|------------|-----------|---|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.2.4 | | Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 |
| 3.2.4 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 |
| 3.2.4 | 5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 |
| 3.2.4 | 5.2.6.04. | Belanja Pemeliharaan Bangunan | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 |
| 3.3 | | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 38.000.000,00 | 35.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 3.3.3 | | Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa | 23.000.000,00 | 20.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 3.3.3 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 23.000.000,00 | 20.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 3.3.3 | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 23.000.000,00 | 20.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 3.3.3 | 5.2.1.06. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| 3.3.3 | 5.2.1.09. | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 18.000.000,00 | 15.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 3.3.5 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 |
| 3.3.5 | 5.3. | Belanja Modal | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 |
| 3.3.5 | 5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 |
| 3.3.5 | 5.3.4.04. | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sew | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 |
| 3.4 | | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 0,00 |
| 3.4.1 | | Pembinaan Lembaga Adat | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 3.4.1 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 3.4.1 | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 3.4.1 | 5.2.2.03. | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 3.4.2 | | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 3.4.2 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 3.4.2 | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 3.4.2 | 5.2.2.03. | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 3.4.3 | | Pembinaan PKK | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 |
| 3.4.3 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 |
| 3.4.3 | 5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 |
| 3.4.3 | 5.2.3.03. | Belanja Kursus Pelatihan | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 |
| 4 | | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 |
| 4.3 | | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 |
| 4.3.2 | | Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 |
| 4.3.2 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 |
| 4.3.2 | 5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 |
| 4.3.2 | 5.2.3.03. | Belanja Kursus Pelatihan | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 |
| 5 | | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT | 93.600.000,00 | 93.600.000,00 | 0,00 |
| 5.3 | | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 93.600.000,00 | 93.600.000,00 | 0,00 |

Realisasi s.d 31/12/2023

| KODE REK | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | LEBIH/(KURANG) (Rp) |
|----------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.3.0 | | Penanganan Keadaan Mendesak | 93.600.000,00 | 93.600.000,00 | 0,00 |
| 5.3.0 | 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 93.600.000,00 | 93.600.000,00 | 0,00 |
| 5.3.0 | 5.4.1. | Belanja Tidak Terduga | 93.600.000,00 | 93.600.000,00 | 0,00 |
| 5.3.0 | 5.4.1.01. | Belanja Tidak Terduga | 93.600.000,00 | 93.600.000,00 | 0,00 |
| JUMLAH BELANJA | | | 1.074.818.490,00 | 1.071.804.395,00 | 3.014.095,00 |
| SURPLUS / (DEFISIT) | | | (15.088.595,00) | (12.074.500,00) | (3.014.095,00) |
| | 6. | PEMBIAYAAN | | | |
| | 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 15.088.595,00 | 15.088.595,00 | 0,00 |
| | 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 15.088.595,00 | 15.088.595,00 | 0,00 |
| | 6.1.1.01. | SILPA Tahun Sebelumnya | 15.088.595,00 | 15.088.595,00 | 0,00 |
| JUMLAH PEMBIAYAAN | | | 15.088.595,00 | 15.088.595,00 | 0,00 |
| SILPA/SILPA TAHUN BERJALAH | | | 0,00 | 3.014.095,00 | (3.014.095,00) |

UMBUASI BARAT, 08 August 2024

Kepala Desa Umuasi Barat
Kecamatan Hilisawa'ahe



WELIS NGRURU, S Pd

61

3.2.5 Kesimpulan Laporan Realisasi Anggaran

Dari penyusunan laporan realisasi anggaran Pemerintahan Desa Umbu'asi Barat, desa tersebut sudah dapat menyusun laporan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 02. Aplikasi Siskeudes mendukung pemerintah desa dalam proses penyusunan laporan keuangan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Implementasi program aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Umbu'asi Barat bisa dianggap berhasil. Hal ini karena pengelolaan keuangan desa di Desa Umbu'asi Barat telah mengikuti prosedur yang mencakup tahapan Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, serta Pelaporan dan Pertanggungjawaban..
- b. Bagi Sumber Daya Manusia atau operator pengguna aplikasi Siskeudes di Desa Umbu'asi Barat dapat dikatakan sudah cukup siap. Meskipun operator memiliki latar belakang pendidikan SMA, SDM yang ada telah mampu memenuhi kebutuhan operasional aplikasi dengan baik.
- c. Manfaat penggunaan aplikasi ini yakni Pemerintah Desa Umbu'asi Barat dapat terbantuan terkait dalam mengelola finansial desa berbasis teknologi. Hal ini mempermudah pelaporan tepat waktu, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan, serta mendukung prinsip akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana.
- d. Kendala menjalankan aplikasi sistem keuangan desa meliputi ada error cara saat penginputan, menghambat proses tersebut. Selain itu, tahapan penatausahaan memerlukan waktu yang cukup lama dan ketelitian ekstra untuk menghindari kesalahan dalam penginputan data.

4.2 Saran

1. Bagi Pemerintahan Desa

- a. Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Umbu'asi Barat dapat dianggap cukup efektif dan berjalan dengan baik. Hal ini karena pengelolaan keuangan desa di Desa Umbu'asi Barat telah mengikuti prosedur yang mencakup tahapan Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, serta Pelaporan dan Pertanggungjawaban.
- b. Pemerintah Desa Umbu'asi Barat perlu menjaga dan mempertahankan mutu kerja perangkat desa. Hal ini penting agar para pegawai dan perangkat desa dapat mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan desa secara optimal. Dengan mempertahankan kualitas SDM yang baik, Pemerintah Desa Umbu'asi Barat akan memiliki kapabilitas dan kompetensi yang dibutuhkan untuk menjalankan proses pengelolaan keuangan desa dengan efektif. Hal ini mencakup kemampuan dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
- c. Pemerintah Desa Umbu'asi Barat disarankan untuk lebih proaktif dalam berkoordinasi dengan pemerintah setempat atau pendamping desa jika ada permasalahan atau kesalahan pada aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan keuangan desa.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Saran untuk peneliti selanjutnya adalah menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data seperti survei atau kuesioner dalam penelitian terkait Pengoperasian Aplikasi Siskeudes.

3. Ucapan Terimakasih

Dalam penyusunan paper ini, penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memungkinkan penulis untuk menyelesaikan penulisan paper ini. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada pegawai Kantor Desa Umbu'asi Barat, Kecamatan Hilisalawa'ahe, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan paper ini. Tidak lupa, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan teman-teman yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama proses penyelesaian paper ini. Ucapan-ucapan terima kasih tersebut merupakan bentuk apresiasi penulis atas kontribusi dan dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak, baik dari segi spiritual, institusional, maupun personal, sehingga penulis dapat menyelesaikan paper ini dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*, Cetakan 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Jogiyanto, H. M. 1999. *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2021. "Aplikasi".
- Permendagri 73.(2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.Permendagri 73 Tahun 2020.
- BPKP.(2018). *Petunjuk Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes 2.0)*.
- Jogiyanto, H. M. (2017). *Analisis dan Desain (Sistem Informasi Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis)*.
- Faizah, A., & Sari, R. (2022). *Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan di Desa*.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian

Berikut ini adalah daftar pertanyaan wawancara yang diperoleh peneliti di Desa Umbu'asi Barat terkait dengan rumusan masalah dalam penelitian yang berjudul Pengoperasian Aplikasi Siskeudes dalam Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dengan Berpedoman pada PSAP 02 di Desa Umbu'asi Barat.

Nara Sumber :

1. Kaur Keuangan
2. Operator Siskeudes

Daftar Pertanyaan :

I. Kesiapan Pemerintahan Desa Dalam Mengoperasikan Aplikasi Siskeudes

1. Bagaimana kesiapan pemerintahan desa Umbu'asi Barat dalam menerapkan aplikasi Siskeudes ?
2. Bagaimana cara Pemerintahan Desa dalam Megintergrasikan aplikasi Siskeudes kepada SDM nya?
3. Siapa yang mengoperasikan Aplikasi Siskeudes dan perbedaaanya bagaimana sebelum dan sesudah menggunakan apikasi Siskeudes ?
4. Bagaimana kualitas akuntabilitas keuangan desa setelah menerapkan aplikasi Siskeudes ?

II Implementasi Aplikasi Siskeudes di Desa Umbu'asi Barat

1. Sejak kapan desa Umbu'asi Barat mulai menerapkan aplikasi Siskeudes ?
2. Apakah di Desa Umbu'asi Barat sudah menerapkan yang namanya PSAP 02 dalam pengoperasian aplikasi Siskeudes ?

3. Apakah implementasi aplikasi Siskeudes di Desa Umbu'asi Barat memengaruhi kinerja pemerintahan desa dalam menyusun laporan keuangan desa ?
4. Apa dampak yang dirasakan dengan adanya aplikasi Siskeudes ?

Transkrip Rekaman Wawancara

Nama Informan 1 : Martinus Waruwu
Jabatan : Kaur Keuangan
Nama Informan 2 : Primer Abdi Putra Waruwu, S.p
Jabatan : Operator Siskeudes
Tanggal/Jam : 2 Agustus 2024 pukul 11.00 – 13.15 WIB
Disusun : 3 Agustus 2024
Tempat Wawancara : Lingkungan Desa Umbu'asi Barat
Topik Wawancara : 1. Kesiapan Pemerintahan Desa Dalam Mengoperasikan Aplikasi Siskeudes.
2. Implementasi Aplikasi Siskeudes di Desa Umbu'asi Barat.

| Materi Wawancara | |
|---|--|
| Kesiapan Pemerintahan Desa Dalam Menerapkan Aplikasi Siskeudes | |
| Peneliti | Bagaimana kesiapan pemerintahan desa Umbu;asi Barat dalam menerapkan aplikasi Siskeudes ? |
| Informan 1 | Kesiapannya pemerintahan desa mengadakan training untuk operator Siskeudes, training diadakan lebih dua kali, agar mudah memahami dalam menjalankan aplikasi tersebut. |
| Informan 2 | Kesiapan pemerintahan desa dalam melaksanakan aplikasi Sistem Keuangan Desa sudah dikatakan siap, karena dari segi SDM sudah terpenuhi. |
| Peneliti | Bagaimana cara Pemerintahan Desa dalam Megintergrasikan aplikasi Siskeudes kepada SDM nya? |

| | |
|------------|--|
| Informan 1 | Sebelumnya ada solusi dari Pemerintahan Desa kemudian ada training untuk operatornya tidak hanya sekali tapi berulang kali. Jadi operator dikumpulkan kemudian dibimtek bagaimana cara menggunakan aplikasi Siskeudes. Kebetulan saya dulu yang mengoperatori jadi saya dibimtek. Kemudian tahun 2023 kita mengangkat staf keuangannya itu Bapak Abdi Putra sebagai operator Siskeudes. |
| Informan 2 | Karena aplikasi Siskeudes ini sangat ribet, banyak menu-menunya, tetapi cara untuk mengintegrasikan sumber daya manusia melalui pendampingan dan pelatihan. Selain itu kita harus mau belajar, kita harus mengikuti dan mencermati semua prosesnya. Karena ini juga sistem yang baru dan banyak prosesnya, jadi kita juga harus lebih aktif belajarnya. Kita harus lebih aktif bertanya apabila kita ada kendala, kalau tidak aktif kita tidak akan bisa. |
| Peneliti | Siapa yang mengoperasikan aplikasi Siskeudes dan perbedaannya bagaimana sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi Siskeudes ? |
| Informan 1 | Yang mengoperasikan hanya satu yaitu operator Siskeudes Bapak Primer Abdi Putra, tapi masih berhubungan erat dengan saya sebagai bendahara desa, tapi disetujui oleh semua perangkat sebenarnya berkaitan dengan ini tapi hanya satu orang mengoperatori kalau lebih dari satu nanti malah rusak aplikasinya. Untuk perbedaannya tidak ada yang membedakan menggunakan excel dengan aplikasi siskeudes hanya kalau dulu anggaran desa kecil sekarang desa besar jadi pemerintahan mewajibkan menggunakan aplikasi siskeudes. Jadi dari segi penggunaannya tidak ada yang membedakan sama saja. |

| | |
|---|---|
| Informan 2 | Yang mengoperasikan aplikasi siskeudes seorang operator atau saya sendiri, sebagai operator desa sejak tahun 2023 hingga saat ini, perbedaannya ya sangat berbeda sekali, sebelum ada aplikasi. Perbedaannya lebih mudah menggunakan aplikasi siskeudes karena pekerjaan lebih mudah dikerjakan, kita sebagai operatornya tinggal memasukan saja nominal uang yang ada di APBDes. |
| Peneliti | Bagaimana kualitas akuntabilitas keuangan desa setelah menerapkan aplikasi Siskeudes ? |
| Informan 1 | Laporan keuangan sangat aman dan terjaga sekali. Pemantauan dan pengawasannya sangat mudah sekali kalau memang ada kebocoran-kebocoran keuangan pasti diketahui jadi anggaran tidak bisa dimanipulasi. |
| Informan 2 | Setelah menggunakan aplikasi siskeudes laporan keuangan semakin tertatarapi dan dapat dipahami oleh semua orang. Akuntabilitas dilakukan oleh pemerintahan desa sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan setiap kegiatan/program yang dijalankan. |
| Implementasi Aplikasi Siskeudes di Desa Umbu'asi Barat | |
| Peneliti | Sejak kapan desa Umbu'asi Barat mulai menerapkan aplikasi Siskeudes ? |
| Informan 1 | Sejak tahun 2022, saya yang mengoperasikan sebelum dibantu operator siskeudes yang sekarang ini. |
| Informan 2 | Sebenarnya siskeudes mulai diterapkan di Desa Umbu'asi Barat Oktober 2022 sudah dibimtek tapi belum valid penggunaan yang selanjutnya tahun 2023 aplikasi siskeudes baru benar-benar |

| | |
|------------|--|
| | diterapkan disini. |
| Peneliti | Apakah didesa Umbu'asi Barat sudah menerapkan yang namanya PSAP 02 dalam pengoperasian aplikasi Siskeudes ? |
| Informan 1 | Masih belum, karna terbatasnya pengetahuan bagaimana menerapkan PSAP 02. |
| Informan 2 | Iya masih belum, karena kurangnya sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan desa. |
| Peneliti | Apakah implementasi aplikasi Siskeudes di Desa Umbu'asi Barat memengaruhi kinerja pemerintahan desa dalam menyusun laporan keuangan desa ? |
| Informan 1 | Sebenarnya yang mempengaruhi kinerja itu jumlah anggarannya kalau anggarannya sedikit pengerjaannya juga sedikit tapi kalau dananya banyak/besar maka pengerjaannya juga banyak. |
| Informan 2 | Sangat mempengaruhi karena semenjak menggunakan aplikasi siskeudes kinerja lebih teliti, tepat waktu, dan disiplin. |
| Peneliti | Apa dampak yang dirasakan dengan adanya aplikasi Siskeudes ? |
| Informan 1 | Dampak yang dirasakan gak ada sama saja tapi memang lebih aman saja. |
| Informan 2 | Penggunaan anggaran yang saat ini dikelola menggunakan aplikasi siskeudes itu benar nyata tidak akan bisa selisih ketemu real angkanya. |

PENGOPERASIAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN DENGAN BERPEDOMAN PADA PSAP 02 (PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH) DI DESA UMBU'ASI BARAT

ORIGINALITY REPORT

33%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|---|----------------|
| 1 | repository.unhas.ac.id Internet | 197 words — 4% |
| 2 | digilibadmin.unismuh.ac.id Internet | 73 words — 1% |
| 3 | fliphtml5.com Internet | 64 words — 1% |
| 4 | repository.unmuhjember.ac.id Internet | 60 words — 1% |
| 5 | 123dok.com Internet | 56 words — 1% |
| 6 | repository.unja.ac.id Internet | 51 words — 1% |
| 7 | repository.unwira.ac.id Internet | 49 words — 1% |
| 8 | repository.radenintan.ac.id Internet | 44 words — 1% |

| | | |
|----|---|-----------------|
| 9 | dspace.uui.ac.id Internet | 43 words — 1% |
| 10 | repository.umsu.ac.id Internet | 42 words — 1% |
| 11 | eprints.umm.ac.id Internet | 35 words — 1% |
| 12 | jurnal.unma.ac.id Internet | 35 words — 1% |
| 13 | repository.ar-raniry.ac.id Internet | 34 words — 1% |
| 14 | repositori.uma.ac.id Internet | 33 words — 1% |
| 15 | www.scribd.com Internet | 32 words — 1% |
| 16 | repositori.uin-alauddin.ac.id Internet | 31 words — 1% |
| 17 | repository.stiedewantara.ac.id Internet | 29 words — 1% |
| 18 | eprints.walisongo.ac.id Internet | 27 words — 1% |
| 19 | repository.unibos.ac.id Internet | 27 words — 1% |
| 20 | etd.umy.ac.id Internet | 26 words — < 1% |

| | | |
|----|--|-----------------|
| 21 | repository.ub.ac.id Internet | 26 words — < 1% |
| 22 | repository.upp.ac.id Internet | 25 words — < 1% |
| 23 | eprints.polsri.ac.id Internet | 24 words — < 1% |
| 24 | Hofifah Hofifah, Abd Aziz, Abd Ghafur. "Peran E-Commerce Dalam Meningkatkan Pendapatan Penjualan Dalam Perspektif Islam", OIKONOMIKA: Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2022 Crossref | 23 words — < 1% |
| 25 | repository.unsri.ac.id Internet | 22 words — < 1% |
| 26 | id.123dok.com Internet | 21 words — < 1% |
| 27 | jurnal.itbsemarang.ac.id Internet | 19 words — < 1% |
| 28 | text-id.123dok.com Internet | 19 words — < 1% |
| 29 | blogsainulh.wordpress.com Internet | 18 words — < 1% |
| 30 | eprints.ahmaddahlan.ac.id Internet | 18 words — < 1% |
| 31 | eprints.stiei-kayutangi-bjm.ac.id Internet | 18 words — < 1% |

| | | |
|----|--|-----------------|
| 32 | Internet | 18 words — < 1% |
| 33 | katalog.ukdw.ac.id Internet | 17 words — < 1% |
| 34 | www.slideshare.net Internet | 17 words — < 1% |
| 35 | siakri.gresikkab.go.id Internet | 16 words — < 1% |
| 36 | es.scribd.com Internet | 15 words — < 1% |
| 37 | repository.umy.ac.id Internet | 15 words — < 1% |
| 38 | eprints.umpo.ac.id Internet | 14 words — < 1% |
| 39 | repositori.unsil.ac.id Internet | 14 words — < 1% |
| 40 | skripsistie.files.wordpress.com Internet | 14 words — < 1% |
| 41 | digilib.uns.ac.id Internet | 13 words — < 1% |
| 42 | ejurnal.stie-trianandra.ac.id Internet | 13 words — < 1% |
| 43 | repo.apmd.ac.id Internet | 13 words — < 1% |
| 44 | repository.ustjogja.ac.id | |

Internet

13 words — < 1%

45 [Isnaini Rochmaniah, Imelda Dian Rahmawati. "Rural Financial Management: Moderating Role of Internal Control in the Digital Governance Era.", Academia Open, 2023](#)
Crossref

12 words — < 1%

46 [etheses.uin-malang.ac.id](#)
Internet

12 words — < 1%

47 [porsepnifc.blogspot.com](#)
Internet

12 words — < 1%

48 [ijppr.umsida.ac.id](#)
Internet

11 words — < 1%

49 [repository.stiegici.ac.id](#)
Internet

11 words — < 1%

50 [repository.uki.ac.id](#)
Internet

11 words — < 1%

51 [repository.wima.ac.id](#)
Internet

11 words — < 1%

52 [skripsi972924424.wordpress.com](#)
Internet

11 words — < 1%

53 [penerbitadm.pubmedia.id](#)
Internet

10 words — < 1%

54 [repository.syekhnurjati.ac.id](#)
Internet

10 words — < 1%

55 [repository.univ-tridinanti.ac.id](#)
Internet

10 words — < 1%

56 uia.e-journal.id
Internet

10 words — < 1%

57 Hijratul Aeni Milenia, Lukman Effendy, Nurabiah Nurabiah. "Efektivitas Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Taman Sari Kecamatan Gunungsari)", Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja, 2023
Crossref

9 words — < 1%

58 Putri Wahyuni, Dheo Rimbano, Sutanta Sutanta. "The Effect of Compensation and Motivation on Employee Performance at the Agriculture Office of Empat Lawang Regency", Proceedings International Conference on Business, Economics & Management, 2023
Crossref

9 words — < 1%

59 Seprima Yenti. "artikel seprima yenti", INA-Rxiv, 2019
Publications

9 words — < 1%

60 Uswatun Hasanah. "FULL PAPER", VALUE, 2020
Crossref

9 words — < 1%

61 Vivi Pancasari Kusumawardani. "Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan", Neraca: Jurnal Pendidikan Ekonomi, 2020
Crossref

9 words — < 1%

62 comserva.publikasiindonesia.id
Internet

9 words — < 1%

63 digilib.uinsby.ac.id
Internet

| | | |
|----|--|----------------|
| | | 9 words — < 1% |
| 64 | doku.pub Internet | 9 words — < 1% |
| 65 | jatimtimes.com Internet | 9 words — < 1% |
| 66 | library.polmed.ac.id Internet | 9 words — < 1% |
| 67 | repository.pelitabangsa.ac.id:8080 Internet | 9 words — < 1% |
| 68 | Irwandi Irwandi, Andrizal Andrizal, Suhermi Suhermi. "Urgensi Aplikasi Sistem Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Administrasi Keuangan Di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat", Jurnal Sains Sosio Humaniora, 2020 Crossref | 8 words — < 1% |
| 69 | digilib.uinkhas.ac.id Internet | 8 words — < 1% |
| 70 | ejournal.mandalanursa.org Internet | 8 words — < 1% |
| 71 | kesmas.ulm.ac.id Internet | 8 words — < 1% |
| 72 | kodam14hasanuddin-tniad.mil.id Internet | 8 words — < 1% |
| 73 | repository.fe.unj.ac.id Internet | 8 words — < 1% |

| | | |
|----|---|----------------|
| 74 | repository.ibs.ac.id Internet | 8 words — < 1% |
| 75 | repository.its.ac.id Internet | 8 words — < 1% |
| 76 | repository.pip-semarang.ac.id Internet | 8 words — < 1% |
| 77 | repository.uin-suska.ac.id Internet | 8 words — < 1% |
| 78 | www.bpkp.go.id Internet | 8 words — < 1% |
| 79 | www.cakaplah.com Internet | 8 words — < 1% |
| 80 | www.cnnindonesia.com Internet | 8 words — < 1% |
| 81 | Tsana Qotrunnada Oktariani, Dian Purwanti, Andi Mulyadi. "Efektivitas Aplikasi SIAP terhadap Kedisiplinan Pegawai Sekretariat Daerah Kota Sukabumi", Jurnal Governansi, 2021 Crossref | 7 words — < 1% |
| 82 | eprints.iain-surakarta.ac.id Internet | 7 words — < 1% |
| 83 | Ilmi Usrotin Choiriyah, Ahmad Riyadh U.B, Hendra Sukmana. "The Effectiveness of the Government to Government (G2G) Model Through SISKEUDES", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2023 Crossref | 6 words — < 1% |

84 Patricia Watulingas, Lintje Kalangi, I Gede Suwetja. "Peranan Sistem Keuangan Desa terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi kasus di Desa Kapataran Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa)", Indonesia Accounting Journal, 2019 6 words — < 1%
Crossref

85 Roy Marthen Moonti. "Problematika Pengangkatan Perangkat Desa Dan Pengelolaan Dana Desa", INA-Rxiv, 2019 6 words — < 1%
Publications

86 journal.perbanas.ac.id 6 words — < 1%
Internet

EXCLUDE QUOTES OFF

EXCLUDE SOURCES OFF

EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON

EXCLUDE MATCHES OFF